

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2016 tetap menunjukkan perkembangan yang positif, dimana produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp452.345.242,07 juta. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya masih tumbuh menggeliat ditengah kondisi ekonomi global yang mengalami pertumbuhan moderat.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kota Surabaya dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp124.801.368,44 juta. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu industri pengolahan sebesar Rp85.527.271,00 juta dan penyedia makanan dan minuman sebesar Rp70.922.863,27 juta. Selaras dengan karakteristik Kota Surabaya sebagai kota besar dengan segala aktivitas ekonomi yang padat, lapangan usaha tersier seperti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan makan minum menjadi kategori lapangan usaha yang mendominasi diantara kategori lainnya.

Besarnya produktivitas ketiga kategori lapangan usaha tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik seperti gedung perkantoran maupun perumahan di Kota Surabaya. Kategori lapangan usaha penunjang lainnya yang mengalami produktivitas tinggi selama tahun 2016 yaitu

kategori informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa pendidikan.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, maka nilai PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp504.369.488,95 juta. Sama seperti tahun 2016, kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi penopang utama perekonomian Kota Surabaya di tahun 2017. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kota Surabaya terangkum dalam Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	820.350,49	912.908,78
B	Pertambangan dan Penggalian	29.713,21	31.262,17
C	Industri Pengolahan	85.527.271,00	98.372.487,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.094.419,86	2.098.536,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678.586,67	769.554,23
F	Konstruksi	45.133.943,92	51.502.242,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.801.368,44	137.491.996,59
H	Transportasi dan Pergudangan	23.634.681,26	26.479.398,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.922.863,27	77.269.405,71
J	Informasi dan Komunikasi	24.457.105,38	27.518.137,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.105.835,15	26.681.145,97
L	Real Estate	11.889.141,32	12.361.421,97
M,N	Jasa Perusahaan	10.926.169,75	12.193.741,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.221.289,53	6.859.425,05
P	Jasa Pendidikan	11.036.182,83	12.962.295,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.389.778,02	3.782.771,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.676.541,93	7.082.758,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		452.345.242,07	504.369.488,95

Sumber data: Bappeko Surabaya, diolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK kota Surabaya menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar Rp343.922.256,47juta, yang diperkirakan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp365.520.600,22 juta. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2016 sebesar Rp97.586.534,54 juta. Kategori selanjutnya yaitu lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp66.657.284,99 juta serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp49.931.297,69 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570.894,08	620.532,95
B	Pertambangan dan Penggalian	20.183,42	21.189,37
C	Industri Pengolahan	66.657.284,99	72.045.401,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.508.608,17	1.693.212,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	528.322,40	577.553,71
F	Konstruksi	33.887.787,14	35.836.873,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97.586.534,54	104.119.428,13
H	Transportasi dan Pergudangan	16.554.190,88	18.067.358,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.931.297,69	52.416.782,96
J	Informasi dan Komunikasi	22.421.127,22	23.543.750,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.184.785,53	16.790.891,48
L	Real Estate	9.145.630,78	9.892.025,20
M,N	Jasa Perusahaan	7.761.412,08	8.395.445,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.384.611,62	4.563.254,75
P	Jasa Pendidikan	8.052.649,03	8.504.951,55

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.649.121,77	2.847.151,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.077.815,13	5.584.796,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		343.922.256,47	365.520.600,22

Sumber data: Bappeko Surabaya, diaolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

b. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kota Surabaya. Tabel III.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2016 didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 28,38 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi yaitu industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar 19,38 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi PerKategoriTerhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,38	19,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,44	0,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16
F	Konstruksi	9,85	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,38	28,49
H	Transportasi dan Pergudangan	4,81	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,52	14,34
J	Informasi dan Komunikasi	6,52	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,00	4,59
L	Real Estate	2,66	2,71

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		(%)	(%)
M,N	Jasa Perusahaan	2,26	2,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	1,25
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	1,53

Sumber data: Bappeko Surabaya, diolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,07 persen lebih tinggi dibanding 2015 sebesar 5,97 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2015. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 8,71 persen serta jasa keuangan sebesar 7,65 persen.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2017 diperkirakan sedikit membaik secara keseluruhan, tetapi masih ada tantangan yang akan dihadapi pemerintah seperti ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, masih melambatnya perekonomian China serta dinamika harga komoditas internasional menjadi tantangan eksternal. Meskipun demikian, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang berfluktuatif namun kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan optimis tumbuh pada kisaran 5,9-6,3 persen. Penepatan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat Kota Surabaya masih diperkirakan memberikan kontribusi terbesar yang didukung oleh daya beli masyarakat yang tinggi, program pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga untuk menahan

laju inflasi serta tingginya investasi yang ditunjang oleh program program pembangunan pemerintah Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2016*	6,07
2017**	5,9-6,3

Sumber data: Bappeko Surabaya, diaolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

d. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2016 capaian inflasi Kota Surabaya tercatat sebesar 3,22 turun dibanding inflasi pada tahun 2015 yang sebesar 3,43 namun lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa Timur sebesar 2,74 persen dan Nasional sebesar 3,02 persen. Berdasarkan kelompoknya,tingginya capaian inflasi Kota Surabaya dibanding Jawa Timur dan Nasional dipicu oleh inflasi pada kelompok *volatile food* khususnya pada sub kelompok bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, bawangmerah, bawang putih. Faktor tidak seimbangnya permintaan dan ketersediaan ditambah lagi intensitas curah hujan yang tinggi juga turut menjadi faktor yang menyebabkan terbatasnya pasokan bahan makanan dipasaran sehingga memicu terjadinya inflasi di Kota Surabaya. Jika dilihat secara historis, Kota Surabaya selama tahun 2016 mengalami inflasi 9 kali dan mengalami deflasi sebanyak 3 kali. Komoditi yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi Kota Surabaya selama tahun 2016, antara lain bawang merah, rokok kretek filter, bawang putih, cabai rawit. Komoditi lainnya antara lain biaya pendidikan, sewa rumah dan tukang bukan mandor.

Capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sudah dikatakan cukup baik, yakni sesuai sasaran inflasi Jawa Timur dan Nasional $4\% \pm 1\%$. Meskipun inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding inflasi nasional namun capaian inflasi Kota Surabaya patut diapresiasi mengingat karakteristik Kota Surabaya cukup berbeda dibanding dengan karakteristik kab/kota lain di Jawa Timur, seperti faktor padatnya jumlah penduduk, komposisi

penggunaan listrik, ketergantungan Kota Surabaya dengan daerah penghasil akan produk pertanian serta Kota Surabaya sebagai pusat pendidikan. Berdasarkan perkembangan tersebut maka inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar $4\% \pm 1\%$ sebagaimana pada Tabel III.5 berikut.

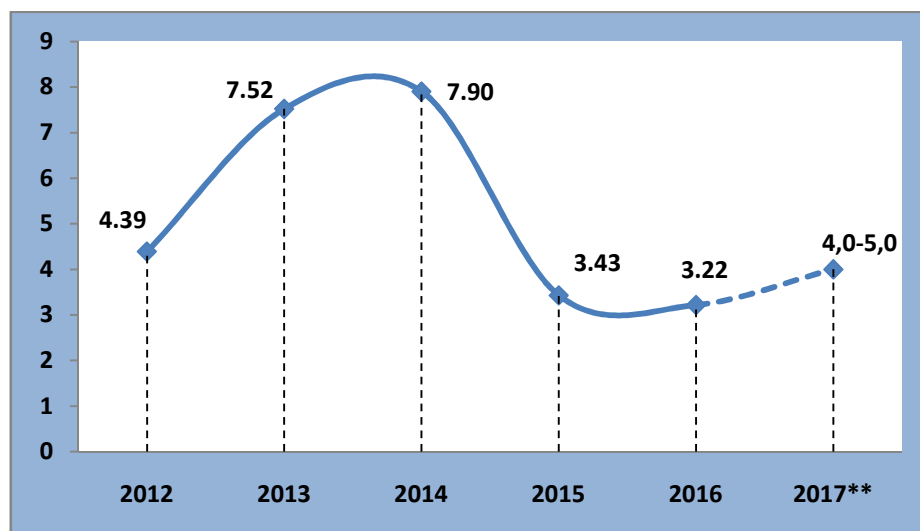
Tabel III.5
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Tahun	Inflasi(%)
2016	3,22
2017**	$4\% \pm 1\%$

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

**) Proyeksi Bappeko Surabaya

Grafik III.1
Grafik Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

**) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

e. Tingkat Investasi (PMA & PMD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menunjukkan kinerja positif ditengah kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan, investasi menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara

otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Sehingga dalam upaya menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya Pemerintah Daerah Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Seperti nampak pada Tabel 3,6 perkembangan investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir berfluktuatif namun memiliki kecenderungan yang meningkat. Artinya, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kota Surabaya ke depan tetap menjanjikan. Pada tahun 2016 realisasi investasi Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1.071.690.000.000. Sementara realisasi penanaman modal luar negeri pada tahun 2016 sebesar USD74.470.000. Mencermati perkembangan tersebut maka investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar ± Rp850.000.000.000 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan sebesar ± USD45.000.000 berasal dari penanaman modal asing. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel III.6 berikut.

Tabel III.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2012	Rp4.396.363.620.332	USD12.176.402
		Rp298.717.956.292
2013	Rp490.271.432.498	USD23.815.769
		Rp91.883.698.021
2014	Rp639.625.900.000	USD45.294.933
		Rp-
2015	Rp828.416.500.000	USD14.675.100
		Rp-
2016*	Rp1.071.690.000.000	USD74.470.000
		Rp-
2017**	Rp850.000.000.000	USD45.000.000
		Rp-

Sumber data: BKPPM dan Bappeko Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Semakin meningkatnya jumlah investasi yang ditamankan di Kota Surabaya mencerminkan semakin berkembangnya perekonomian Kota Surabaya. Meskipun kondisi tersebut dinilai baik, namun perlu dilakukan evaluasi terkait produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan.

Nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2015 secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel III.7. Seperti yang nampak pada tabel tersebut nilai ICOR Kota Surabaya secara rata-rata selama tahun 2011-2015 berada pada kisaran angka 3. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Harrod dan Domar bahwa angka ICOR yang dianggap memiliki investasi yang baik antara 3 – 4.

Tabel III.7
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2011-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
ICOR	4,06	3,83	3,61	3,79	4,30	3,0-4,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka proyeksi Bappeko Surabaya

f. Ekspor dan Impor

Aktivitas perdagangan di Kota Surabaya baik perdagangan antar daerah maupun antara negara yang tercermin dari nilai ekspor impor terbilang masih cukup pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama tahun 2016 realisasi ekspor Kota Surabaya sebesar US\$17.901.405.669. Negara tujuan ekspor Kota Surabaya selama tahun 2016 tertinggi ke negara Singapura sebesar US\$3.154.145.373,21. Selanjutnya ke negara Jepang

dan Cina dengan total ekspor masing-masing sebesar US\$2.550.177.376,66 dan US\$1.880.737.637,64.

Sementara pada sisi impor, kinerja impor non migas Kota Surabaya sebesar US\$14.849.559.537. Berdasarkan asal negara yang menjadi pengimpor kebutuhan Kota Surabaya dan wilayah Indonesia bagian timur mayoritas dipenuhi oleh negara Cina sebesar US\$4.305.957.690,33 dan selanjutnya berasal dari yaitu negara-negara dikawasan ASEAN sebesar US\$2.379.698.175 serta negara kawasan Amerika sebesar US\$2.694.070.650,24.

Kinerja aktivitas perdagangan Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi global yang masih berfluktuatif, adanya rencana kebijakan baru yang akan diterapkan oleh salah satu negara mitra dagang Kota Surabaya, stabilitas nilai rupiah diperkirakan akan mampu mempengaruhi kinerja ekspor impor Kota Surabaya ke depan sehingga pada tahun 2017 kinerja perdagangan Kota Surabaya diperkirakan sebesar US\$19.585.497.986 untuk ekspor dan sebesar US\$17.030.104.405 untuk impor.

Tabel III.8
Ekspor Kota Surabaya Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017

Tahun		2016*	2017**
Ekspor	Nilai (US \$)	17.901.405.669	19.585.497.986,00
Impor	Nilai (US \$)	14.849.559.537	17.030.104.405,00

Sumber data: Bank Indonesia, 2017**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

g. Tingkat pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Nasional. Kondisi ini dapat diindikasikan bila Kota Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi pencari kerja di daerah Jawa Timur, sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, maupun Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun perbandingan TPT di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tabel berikut.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Kota Surabaya	Jawa Timur	Nasional
2016	8,4**	4,21	5,61
2017**	6,73-8,4	4,02-3,93	5,0-5,3

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, RPJMD Jawa Timur 2014-2019, RPJMN 2014-2019

h. Incremental *Labour Output Ratio* (ILOR)

Kinerja ekonomi Kota Surabaya yang tinggi tentunya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dengan seberapa besar kemampuan peningkatan ekonomi tersebut mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, instrumen *Incremental Labour Output Ratio* menjadi indikator yang tepat untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan

Berdasarkan Data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada 2012 sebesar 0,04. Sementara ILOR terendah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 0,01. Kondisi ini memberikan arti bila kenaikan output pada tahun 2014 tidak dibarengi dengan penambahan penyerapan jumlah tenaga kerja. Melihat kondisi perekonomian terkini nilai ILOR Kota Surabaya pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan besarnya sama yaitu kisaran 0,01-0,02.

Tabel III.10
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
 Tahun 2010-2014 dan Perkiraan Tahun 2015-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
ILOR	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01	0.01

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Surabaya hingga tahun 2016 serta proyeksi perekonomian tahun 2017, maka berikut ini tantangan dan prospek perekonomian kota Surabaya yang akan dihadapi dan berpengaruh pada tahun 2018 dan 2019:

a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

a.1. Kekuatan

Pertama: Kinerja perekonomian Kota Surabaya yang tetap tinggi menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Mengingat perekonomian Kota Surabaya memiliki keterkaitan dengan perekonomian wilayah/daerah lain sehingga tidak stabilnya ekonomi wilayah lainnya tentunya berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Surabaya. Namun besarnya konsumsi masyarakat disertai meningkatnya daya beli masih menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kedua: Pesatnya pertumbuhan ekonomi dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum masih menjadi salah satu kekuatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti jumlah penduduk Kota Surabaya banyak, kondisi ekonomi yang aman dan kondusif, tingkat konsumsi yang tinggi, infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku usaha baik ritel maupun eceran untuk berbisnis di Kota Surabaya.

Ketiga: Berdasarkan lokasinya yang strategis, Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan dan kota penghubung sehingga Kota Surabaya berperan penting terhadap perekonomian nasional dan wilayah-wilayah lainnya khususnya Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Kota Surabaya memiliki keuntungan sebagai kota pelabuhan karena dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di Kota Surabaya berkembang pesat sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

Keempat: Kota Surabaya memiliki potensi yang besar khususnya berupa sumber daya manusia. Adanya pembangunan smelter di Gresik dan Teluk Lamong di wilayah Surabaya barat memberikan berdampak besar terhadap meningkatnya perekonomian kota Surabaya dilihat dari tumbuhnya lapangan usaha kategori transportasi dan pergudagangan; perdagangan; industri pengolahan dan kategori jasa.

Kelima: Sesuai kebijakan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan untuk intensifikasi produk pertanian di Jawa Timur yang berdampak terhadap pasokan dan ketersediaan komoditas pertanian bagi Kota Surabaya.

Keenam: Pengembangan infrastruktur semakin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kota Surabaya agar terus berkembang baik melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya, antara lain pembangunan jalan raya dan gorong-gorong. Pembangunan jalan raya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di Kota Surabaya. Tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan investasi. Pembukaan jalan baru semacam jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan frontage Ahmad Yani, diharap dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Sementara pembangunan gorong-gorong ditujukan untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Surabaya. Selain itu, rencana pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) sebagai modal transportasi modern yang akan direalisasikan pada tahun 2018, diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi kemacetan.

Keenam: Sebagai pusat dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri,

perbankan dan jasa-jasa yang dapat menunjang perkembangan perekonomian kota. Selain itu, situasi keamanan yang sangat kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik) menjadi insentif bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

Ketujuh: Kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya lebih baik. Hal ini terlihat dari APBD Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7,9 triliun dan Rp8,2 triliun. Ditargetkan, di tahun 2017 dan 2018 APBD Kota Surabaya dapat mencapai Rp8,5 triliun dan Rp8,7 triliun dan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan perekonomian Kota yang semakin stabil. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

Kedelapan: Struktur belanja pemerintah yang produktif, di mana Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar dalam menyerap belanja daerah. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

a.2. Kelemahan

Pertama: Jumlah penduduk Kota Surabaya yang sekitar 2,9 juta jiwa, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Mekanisme pengendalian dan penataan jumlah penduduk ini perlu dilakukan agar sumberdaya manusianya semakin berkualitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dan memunculkan masalah-masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, kriminalitas dan sebagainya.

Kedua: Kota Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi setiap tahunnya namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh

tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang diperkirakan meningkat di tahun 2018, yaitu sebesar 6,0-7,0%. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* serta masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill*. Ditargetkan angka ini semakin menurun pada tahun 2019 dan tahun-tahun yang akan datang.

Ketiga: Meski pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi belum cukup baik karena masih menghadapi permasalahan yakni pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan antar wilayah serta belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan.

Keempat: Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok Kota Surabaya yang masih rendah, mengingat Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil melainkan pengguna sehingga kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya seperti sayur-sayuran, beras dan komoditas pertanian lainnya dipenuhi oleh daerah lain. Kondisi tersebut yang mendorong Kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi daerah penghasil sehingga jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

Kelima: inflasi Kota Surabaya diperkirakan sama seperti sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4%-5%. Berdasarkan pemicunya, inflasi Kota Surabaya mayoritas dipicu oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*). Namun demikian inflasi kelompok *administered price* juga memiliki potensi besar dalam menyumbang inflasi Kota Surabaya seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga mengingat jumlah dan komposisi masyarakat Kota Surabaya yang sebagian besar dalam golongan tarif penyesuaian. Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat).

Keenam: Belum terealisasinya transportasi massal dalam kota yang murah dan cepat di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk Kota Surabaya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, konsumsi bahan bakar kendaraan dan volume kendaraan di Kota Surabaya semakin meningkat. Hal ini memicu kemacetan di Kota Surabaya.

Ketujuh: Beban dan belanja infrastruktur Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Disadari bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada suatu daerah dan selanjutnya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang mampu menopang pembiayaan infrastruktur Kota Surabaya kedepannya, baik dalam format kerjasama dengan pihak swasta maupun mekanisme inovatif lain yang tersedia misalnya melalui surat berharga daerah maupun pinjaman atau pendanaan oleh pemerintah pusat.

Kedelapan: Kemudahan berbisnis di Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang masih rendah dibanding negara-negara kompetitor. Berdasarkan data *Ease of Doing Business* tahun 2015, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik dari sisi biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dan izin untuk mendirikan bangunan yang dianggap masih kurang tepat.

a. Analisis Kondisi Eksternal

b.1. Peluang

Pertama: Kota Surabaya sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur akan memberikan andil besar dalam momen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Surabaya untuk membuka jaringan yang lebih mudah dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek

Kedua: adanya arus barang dan jasa dalam MEA berpotensi pada melimpahnya barang dan jasa. Disatu sisi menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Surabaya, yakni masyarakat Kota Surabaya mendapatkan barang dan

saja dengan mudah dari banyak aneka jenis baik dari sisi kualitas maupun harga. Sisi lainnya, diharapkan Kota Surabaya tidak hanya menjadi tujuan pasar melainkan juga memproduksi sendiri yang mampu bersaing baik dari produk barang dan jasa serta tenaga kerja yang terampil. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah produk-produk Usaha mikro kecil sehingga Kota Surabaya perlu memperkuat daya saing dari industri Usaha mikro kecil.

Ketiga: Potensi perekonomian Kota Surabaya yang cukup besar dan menjanjikan dengan berbagai daya dukung infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai sasaran target investasi dari luar negeri. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses kredit perbankan turut mendukung kinerja investasi di Kota Surabaya.

Keempat: Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan yang berperan sebagai pintu aktivitas perdagangan barang dan jasa di wilayah Indonesia bagian timur. Disamping itu, adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya sehingga adanya pengembangan infrastruktur yang semakin lengkap memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan barang dan jasa baik antara pulau, regional maupun perdagangan internasional.

b.2. Ancaman

Pertama: Proses perbaikan ekonomi negara-negara maju masih berjalan lambat berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Disamping itu, rencana kebijakan baru yang akan diterapkan oleh mitra dagang Kota Surabaya diperkirakan juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

Kedua: Masih tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berdampak pada peningkatan biaya impor yang lebih tinggi. Meningkatnya barang impor tersebut secara otomatis meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya memicu inflasi.

Ketiga: Semakin bebasnya arus perdagangan setelah diterapkannya MEA, maka semakin besar pula arus barang dan jasa yang akan masuk memenuhi pasar Kota Surabaya, mengingat Kota Surabaya memiliki potensi jumlah penduduk yang besar yang disertai tingkat daya beli yang tinggi tentunya menjadi sasaran pasar yang menguntungkan produsen luar, oleh karena itu diperlukan peningkatan daya saing untuk produk lokal bersaing dengan produk luar. Disamping itu, selain masuknya barang-baran produk luar, masuknya tenaga kerja asing menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal Surabaya sehingga perlu membuat solusi melalui perencanaan program maupun kebijakan untuk melindungi tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 Dan 2019

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2015 dan tahun 2016, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp389.610.266,11 juta. Melihat Kota Surabaya yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2019 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp414.898.101,03 juta. Peningkatan ini tentunya terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp110.847.072,40 juta. Sektor ini setiap tahunnya diperkirakan masih memberikan kontribusi tertinggi hingga menjadi sebesar Rp118.458.881,89 juta pada tahun 2019. Sektor terbesar kedua yang menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor industri pengolahan, dimana pada tahun 2018 menghasilkan PDRB sebesar Rp76.635.493,52 juta menjadi sebesar Rp81.834.840,13 juta di tahun 2019.

Tabel III.11
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2018**	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	642.196,87	674.976,77
B	Pertambangan dan Penggalian	23.526,14	24.833,75
C	Industri Pengolahan	76.635.493,52	81.834.840,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.790.367,04	1.931.289,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	622.736,36	686.222,74
F	Konstruksi	38.142.602,16	40.635.602,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.847.072,40	118.458.881,89
H	Transportasi dan Pergudangan	19.149.143,12	20.511.755,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.734.904,38	59.707.166,57
J	Informasi dan Komunikasi	25.026.217,54	26.655.513,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.098.275,51	18.877.467,08
L	Real Estate	10.547.597,13	11.251.760,69
M,N	Jasa Perusahaan	8.990.756,22	9.510.033,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.826.206,80	5.067.549,87
P	Jasa Pendidikan	9.107.519,29	9.674.795,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.950.213,51	3.123.102,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.865.398,11	6.272.309,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		389.210.266,11	414.898.101,03

Sumber data:**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

2) Peranan Sektoral

Hingga tahun 2018 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat, dimana struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Sehingga sektor yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut setiap tahunnya diperkirakan memberikan kontribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Surabaya dengan

kontribusi sebesar 27,70 persen dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 28,48 persen. Mengingat tingginya aktivitas ekonomi perdagangan di Kota Surabaya secara otomatis berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sektor Industri Pengolahan. Hal Tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tentunya akan mendorong meningkatnya produksi sehingga mendorong lapangan usaha industri pengolahan juga tumbuh tinggi. Pada tahun 2018 industri pengolahan diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 19,69 persen dan meningkat menjadi 19,72 pada tahun 2019. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 terangkum dalam Tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel III.12

Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2018**	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,69	19,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17
F	Konstruksi	9,80	9,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,48	28,55
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,32	14,39
J	Informasi dan Komunikasi	6,43	6,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	4,55
L	Real Estate	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,31	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,24	1,22
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,51	1,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan pada kisaran 6,4%-7,0% persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi dibanding capaian pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Meskipun kondisi ekonomi global masih berfluktuatif, namun pondasi utama makro Kota Surabaya yaitu tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang disertai tingkat daya beli yang tinggi diperkirakan masih mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Disamping itu, adanya rencana program-program pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi faktor dasar perkiraan ekonomi ke depan tetap tumbuh positif.

Tabel III.13
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019(dalam Persen)

Uraian	2018**	2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4%-7,0%	6,5%-7,1%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

4) Tingkat Inflasi

Berdasarkan perkembangan inflasi terkini dan mencermati perkembangan indikator harga, realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 3,22 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya tersebut lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur (2,74 persen) dan Nasional (3,02 persen), namun inflasi Kota Surabaya tersebut tergolong masih rendah dan memenuhi target sasaran inflasi nasional yaitu 3,5%-4,5%. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dan 2019 inflasi Kota Surabaya diperkirakan masih dalam kisaran 3,5%-4,5%. Pemicu inflasi Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) mengingat kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya masih dipenuhi oleh daerah-daerah penghasil disekitar wilayah Kota Surabaya.

Tabel III.14
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019(dalam Persen)

Uraian	2018**	2019**
Inflasi (%)	3,5%-4,5%	3,5%-4,5%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu *soft* infrastruktur maupun *hard* infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi target investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, investasi Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan meningkat baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2018 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar Rp765,42milyar yang berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar USD 33,18 juta. Performa positif ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2019 dengan capaian investasi sebesar Rp811,32 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD38,22 juta.

Tabel III.15
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN (dalam Milyar Rp)	PMA (JutaUSD)
2018**	765,42	33,18
2019**	811,32	38,22

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya makapada tahun 2018 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$22.583.990.048, sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$19.591.246.281. Kemudian kinerja perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan masing-masing mencapai US\$25.294.068.854 untuk ekspor dan US\$21.550.370.909 untuk impor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.16

Tabel III.16
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam US\$)

Tahun	2018**	2019**
Ekspor	22.583.990.048	25.294.068.854
Impor	19.591.246.281	21.550.370.909

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya pada tahun 2017-2018 diestimasikan mengalami sedikit penurunan, dengan asumsi kondisi perekonomian berjalan sesuai dengan estimasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel III.17.

Tabel III.17
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018**	6,0 - 7,0
2019**	6,0 - 7,0

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

A. Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar 55,56% dan pada tahun 2018 sebesar 57,46% atau mengalami peningkatan sebesar 1,90% sebagaimana tersaji dalam Tabel III.18 berikut :

Tabel III.18
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	4.035.649.478.398	60,97%
2	Realisasi 2016	6.825.754.275.892	4.090.206.769.388	59,92%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	4.212.569.176.921	55,56%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	4.559.906.482.546	57,46%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 74,24% dan pada tahun 2018 sebesar 74,73% atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% (Tabel III.19).

Tabel III.19
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	2.738.899.424.558	67,87%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	3.000.152.510.888	73,35%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	3.127.522.197.439	74,24%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	3.407.812.453.581	74,73%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 7,55% dan 7,73% pada tahun 2018, atau mengalami penurunan 0,18% (Tabel III.20)

Tabel III.20
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	537.319.752.463	13,31%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	339.453.230.306	8,30%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	318.061.505.925	7,55%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	352.278.666.039	7,73%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 3,95% dan pada tahun 2018 sebesar 3,23% atau mengalami pengurangan 0,72% hal ini dikarenakan ada

penyesuaian pada rencana PAK tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan laba rugi audit tahun 2016 (Tabel III.21).

Tabel III.21
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	135.324.221.731	3,35%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	131.847.096.407	3,22%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	166.311.576.799	3,95%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	147.368.580.989	3,23%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2017 sebesar 14,26% sedangkan Tahun 2018 diproyeksikan 14,31% atau mengalami peningkatan sebesar 0,05% hal ini dikarenakan untuk penentuan target murni denda tahun 2018 tidak diperhitungkan. (Tabel III.22).

Tabel III.22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	624.106.079.645	15,46%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	618.754.058.188	15,13%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	600.673.896.758	14,26%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	652.446.781.937	14,31%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2017 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 29,91% sedangkan proyeksi Tahun 2018 sebesar 29,80% atau penurunan sebesar 0,11% sebagaimana tersaji pada Tabel III.23.

Tabel III.23
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.384.772.424.683	20,92%
2	Realisasi 2016	6.825.754.275.892	1.941.019.526.654	28,44%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	2.267.796.097.195	29,91%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	2.364.949.471.866	29,80%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap Dana Perimbangan pada Tahun 2017 sebesar 19,24% sedangkan Tahun 2018 sebesar 22,25% atau mengalami peningkatan 3,02% sebagaimana tersaji pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	206.314.915.900	14,90%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	393.908.771.611	20,29%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	436.222.686.000	19,24%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	526.305.837.327	22,25%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan Tahun 2017 sebesar 1,21% sedangkan Tahun 2018 sebesar 1,46% atau mengalami peningkatan 0,25% sebagaimana tersaji pada Tabel III.25.

Tabel III.25
Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Bukan Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	23.946.332.783	1,73%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	18.880.139.043	0,97%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	27.543.339.103	1,21%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	34.613.562.447	1,46%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2017 sebesar 59,31% sedangkan Tahun 2018 sebesar 56,87% atau mengalami penurunan 2,44% sebagaimana tersaji pada Tabel III.26.

Tabel III.26
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	1.147.385.486.000	82,86%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	1.233.380.404.000	63,54%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	1.345.040.944.092	59,31%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	1.345.040.944.092	56,87%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2017 sebesar 20,24% sedangkan Tahun 2018 sebesar 19,41% atau mengalami penurunan sebesar 0,83% hal ini dikarenakan penentuan target tahun 2018 disamakan dengan tahun 2017 sebagaimana tersaji pada Tabel III.27.

Tabel III.27
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Khusus	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	7.125.690.000	0,51%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	294.850.212.000	15,19%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	458.989.128.000	20,24%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	458.989.128.000	19,41%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2017 kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,53% sedangkan proyeksi Tahun 2018 sebesar 12,74% atau mengalami penurunan sebesar 1,79% sebagaimana tersaji pada Tabel III.28.

Tabel III.28
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tehadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.198.609.257.856	18,11%
2	Realisasi 2016	6.827.414.522.004	794.527.979.850	11,64%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	1.101.721.824.316	14,53%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	1.011.400.712.887	12,74%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi proyeksi dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2017 sebesar 95,46% sedangkan Tahun 2018 sebesar 95,05% maka kontribusinya mengalami penurunan sebesar 0,41% penurunan pada tahun 2018 dikarenakan pada rencana PAK 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan target pendapatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.29
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
tehadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	707.673.658.856	59,04%
2	Realisasi 2016	794.527.979.850	786.702.579.850	99,02%
3	Target 2017	1.101.721.824.316	1.051.700.059.316	95,46%
4	Proyeksi 2018	1.011.400.712.887	961.378.947.887	95,05%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Dana Insentif Daerah terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2017 sebesar 4,54% sedangkan Tahun 2018 sebesar 4,95% maka kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 0,41% Alokasi Dana

Insentif Daerah (DID) Tahun 2018 dengan asumsi opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Kota Surabaya WTP (sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA. 2017 Lampiran XVIII Rincian DID, untuk alokasi APBD 2017). sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.30
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	24.802.882.000	2,07%
2	Realisasi 2016	794.527.979.850	5.000.000.000	0,63%
3	Target 2017	1.101.721.824.316	50.021.765.000	4,54%
4	Proyeksi 2018	1.011.400.712.887	50.021.765.000	4,95%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam Tabel III.31.

Tabel III.31
Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Realisasi 2015-2016, Target 2017, Proyeksi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Pendapatan Asli Daerah	4.035.649.478.398	4.090.206.769.388	4.212.569.176.921	4.559.906.482.546
	a. Pajak Daerah	2.738.899.424.558	3.000.152.384.487	3.127.522.197.439	3.407.812.453.581
	b. Retribusi Daerah	537.319.752.463	339.453.230.306	318.061.505.925	352.278.666.039
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	135.324.221.731	131.847.096.407	166.311.576.799	147.368.580.989
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	624.106.079.645	618.754.058.188	600.673.896.758	652.446.781.937
2	Dana Perimbangan	1.384.772.424.683	1.941.019.526.654	2.267.796.097.195	2.364.949.471.866
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	206.314.915.900	393.908.771.611	436.222.686.000	526.305.837.327
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	23.946.332.783	18.880.139.043	27.543.339.103	34.613.562.447
	c. Dana Alokasi Umum	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000	1.345.040.944.092	1.345.040.944.092
	d. Dana Alokasi Khusus	7.125.690.000	294.850.212.000	458.989.128.000	458.989.128.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.198.609.257.856	794.527.979.850	1.101.721.824.316	1.011.400.712.887
	a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	707.673.658.856	786.702.579.850	1.051.700.059.316	961.378.947.887
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	463.025.317.000	-	-	-
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	3.107.400.000	2.825.400.000	-	-
	d. Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.802.882.000	5.000.000.000	50.021.765.000	50.021.765.000
	JUMLAH PENDAPATAN	6.619.031.160.937	6.825.754.275.892	7.582.087.098.432	7.936.256.667.299

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp6.825.754.275.892,- dan target tahun 2017 sebesar Rp7.582.087.098.432,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp7.936.256.667.299,- atau meningkat sebesar Rp354.169.568.867,- (4,67%) dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp4.090.206.769.388,- dan target tahun 2017 sebesar Rp4.212.569.176.921,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

diperkirakan sebesar Rp4.559.906.482.546,- meningkat sebesar Rp347.337.305.625,- atau 8,25%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp3.000.152.384.487,- dan target tahun 2017 sebesar Rp3.127.522.197.439,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp3.407.812.453.581,-

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp339.453.230.306,- dan target tahun 2017 sebesar Rp318.061.505.925,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp352.278.666.039,-

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- dan target tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp147.368.580.989,- penurunan proyeksi di tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian rencana PAK di tahun 2017 sebesar Rp143.751.180.492,- atau berkurang sebesar Rp22.460.396.307,-

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp618.754.058.188,- dan target tahun 2017 sebesar Rp600.673.896.758,- maka proyeksi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah tahun 2018 sebesar Rp652.446.781.937,-

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.941.019.526.654,- dan target tahun 2017 sebesar Rp2.267.796.097.195,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp2.364.949.471.866,- terjadi peningkatan sebesar Rp97.153.374.671,- atau 4,28% dari tahun 2017.

Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,- dan target tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp526.305.837.327,-.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp18.880.139.043,- dan target tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp34.613.562.447,-.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp1.345.040.944.092,-

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,- dan target tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp458.989.128.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.101.721.824.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.011.400.712.887,- atau mengalami penurunan sebesar Rp90.321.111.429,- (8,20%).

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp786.702.579.820,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan turun yaitu sebesar Rp961.378.947.887,- .
- 2) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah realisasi tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- target tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp50.021.765.000,- karena Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2018 :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat ;

3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Strategi pencapaian Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi:

1. Updating data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak online;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan update data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”**, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2017 diarahkan untuk :

1. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
4. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) non Guru;
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
8. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

9. Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp7.151.661.549.430,- , target tahun 2017 sebesar Rp8.561.848.147.400,- maka perkiraan belanja tahun 2018 sebesar Rp8.862.420.984.171,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.238.879.931.522,- (25,26%) dari total belanja)
2. Belanja Langsung sebesar Rp6.623.541.052.648,- (74,74%) dari total belanja)

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp2.326.910.015.520,- dan target APBD 2017 sebesar Rp.2.274.681.651.124,- maka perkiraan belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar Rp2.238.879.931.522,- dengan rincian :

1. Belanja Pegawai Rp2.154.824.523.522,-
2. Belanja Subsidi Rp19.005.408.000,-
3. Belanja Hibah Rp52.000.000.000,-
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp750.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp2.300.000.000,-
6. Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,-

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016 serta target belanja daerah tahun 2017 dan proyeksi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.32
Belanja Daerah Kota Surabaya
Realisasi Tahun 2015-2016, Target 2017, Proyeksi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Belanja Tidak Langsung	2.202.272.347.768	2.326.910.015.520	2.274.681.651.124	2.238.879.931.522
	a. Belanja Pegawai	1.949.428.530.122	2.092.288.193.728	2.065.242.895.087	2.154.824.523.522
	b. Belanja Subsidi		19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000
	c. Belanja Hibah	252.111.246.646	214.488.143.792	177.606.478.734	52.000.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-			
	e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-		750.000.000	750.000.000
	f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	732.571.000	1.128.270.000	2.076.869.303	2.300.000.000
	g. Belanja Tidak Terduga	-		10.000.000.000	10.000.000.000
2	Belanja Langsung	4.288.087.411.764	4.824.751.533.910	6.287.166.496.276	6.623.541.052.648
	a. Belanja Pegawai	376.989.023.238	448.667.099.371	470.316.573.929	496.216.475.851
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.125.973.133.026	2.586.690.389.712	3.153.463.390.147	3.396.934.606.110
	c. Belanja Modal	1.785.125.255.500	1.789.394.044.827	2.663.386.532.200	2.730.389.970.688
TOTAL BELANJA DAERAH		6.490.359.759.532	7.151.661.549.430	8.561.848.147.400	8.862.420.984.170

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2016 serta target pembiayaan daerah tahun 2017 dan proyeksi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.33
Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Realisasi 2015-2016, Target 2017, Estimasi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Penerimaan Pembiayaan				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.311.544.540.067	1.414.929.806.905	998.767.926.303	934.989.831.871
	b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.865.433	13.183.336,00		
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.311.550.405.500	1.414.942.990.241	998.767.926.303	934.989.831.871
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	25.292.000.000	20.000.000.000	19.006.877.335	8.825.515.000
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN		25.292.000.000	20.000.000.000	19.006.877.335	8.825.515.000

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah 2017.

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp934.989.831.871,- mengalami penurunan sebesar Rp63.778.094.432,- (6,39%) dari tahun 2017.

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pada tahun 2018 sebesar Rp8.825.515.000,- yang rencananya akan diberikan kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.